

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam menghadapi hubungan antara militer dan politik selama proses pemilu, perspektif analitis berdasarkan teori militer dan politik menurut Samuel Huntington memberikan landasan yang kuat untuk memahami dan mengevaluasi tantangan yang dihadapi oleh negara. Netralitas militer, sebagai pilar fundamental dalam mendukung stabilitas politik dan demokrasi, menjadi fokus utama analisis.

Dalam analisis yang mendalam, dapat dikatakan bahwa profesionalisme militer, netralitas politik, dan adaptasi teori Huntington memiliki peran dalam menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan partisipasi militer dalam proses demokratisasi. Hal ini, pada pemilu 2019 sebagai arena pertarungan politik yang intens, dapat dikatakan bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia terdapat oknum-oknum yang tidak netral namun hal ini sudah ditangani oleh pihak internal militer dengan berbagai sanksi mulai dari sanksi ringan berupa sanksi administrasi atau sanksi kedisiplinan maupun sanksi berat berupa dipenjara. Hal tersebut, menguji tekad para anggota Tentara Nasional Indonesia untuk tetap bersikap netral, dan dampaknya dapat dirasakan.

Dengan menganalisis kasus studi, dapat disimpulkan bahwa menjaga netralitas militer selama pemilu adalah hal yang sangat penting dan tugas yang kompleks dan memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah sipil, militer, media, dan masyarakat sipil. Penguatan institusi demokratis, pendidikan militer yang terus-menerus, dan transparansi dalam hubungan sipil-militer dapat menjadi langkah-langkah kunci dalam mendukung netralitas militer dan memastikan integritas proses pemilu.

Netralitas militer juga sebagai kunci dalam menjaga demokrasi dan stabilitas politik. Militer yang netral tidak terlibat dalam politik praktis atau mendukung satu pihak tertentu, sehingga memungkinkan proses politik berjalan dengan adil dan bebas. Hal ini juga dapat mengakibatkan keberhasilan proses pemilihan dan pemerintahan demokratis bergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap netralitas militer. Jika militer terlihat netral, masyarakat lebih cenderung mempercayai integritas dan keberlanjutan sistem politik.

Menjaga netralitas militer adalah aspek kritis untuk memastikan kestabilan, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Pemerintah, militer, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk membangun fondasi yang kuat bagi netralitas militer dan demokrasi yang berkelanjutan.

Pemahaman mendalam terhadap teori militer dan politik, disertai dengan adaptasi kontekstual dan respons terhadap tantangan masa kini, dapat membantu negara dalam membangun pondasi demokratis yang kuat dan memastikan bahwa militer tetap menjadi penjaga stabilitas tanpa mengorbankan prinsip netralitasnya.

Netralitas militer merupakan landasan yang menggambarkan tekad suatu negara untuk menjaga perdamaian dan keamanan tanpa terlibat secara aktif dalam konflik bersenjata antarnegara. Keputusan ini mencerminkan komitmen untuk memprioritaskan diplomasi, penyelesaian konflik secara damai, dan ketidakcampuran dalam urusan militer negara lain. Netralitas militer bukanlah tanda ketidakberdayaan, melainkan bentuk kebijaksanaan strategis yang dapat membuka pintu untuk kerja sama global yang lebih efektif dalam menangani tantangan bersama. Dengan mempertahankan sikap netral, sebuah negara dapat menjadi pelopor ketidakberpihakan, menciptakan lingkungan yang mendukung perdamaian dan kerjasama internasional. Dengan demikian, netralitas militer bukan hanya representasi kebijakan pertahanan, tetapi juga sebuah komitmen untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan harmonis bagi seluruh umat manusia.

4.2 Saran

Peneliti dalam hal ini memberikan saran terkait mempertahankan netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan upaya berupa memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personel militer tentang prinsip-prinsip netralitas, etika militer, dan peran TNI dalam masyarakat demokratis, dan menanamkan pemahaman tentang pentingnya netralitas dalam menjaga stabilitas politik dan mendukung sistem demokrasi. Menegaskan bahwa personel militer wajib mematuhi hukum dan konstitusi negara, dan memastikan bahwa personel militer memahami batasan-batasan hukum terkait keterlibatan mereka dalam urusan politik. Menetapkan kebijakan yang melarang atau membatasi keterlibatan personel militer dalam politik praktis, seperti bergabung dengan partai politik atau menjadi calon politik. membentuk mekanisme internal untuk memantau dan menilai tingkat netralitas personel militer, dan melibatkan lembaga-lembaga pengawasan eksternal, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk memantau netralitas militer selama pemilihan umum, serta menegaskan bahwa peran utama militer adalah menjaga keamanan dan kedaulatan negara.

Dengan mempertahankan netralitas militer, sebuah negara berusaha untuk membangun kepercayaan dengan negara-negara lain, mendorong dialog damai, dan menghindari risiko konflik bersenjata yang dapat merugikan kesejahteraan rakyat. Netralitas militer juga menciptakan landasan bagi partisipasi yang lebih efektif dalam upaya penyelesaian konflik, penanganan krisis kemanusiaan, dan kolaborasi global

dalam mengatasi tantangan bersama. Netralitas militer bukanlah sikap pasif, tetapi merupakan bentuk kebijakan proaktif yang dapat memperkuat peran suatu negara sebagai pemain yang adil dan berkontribusi positif dalam upaya mencapai perdamaian dunia. Dengan demikian, netralitas militer menjadi landasan bagi keberlanjutan, keamanan, dan kesejahteraan global.